BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 9 ayat (3) bahwa urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dan dijelaskan pada ayat (4) bahwa urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Pasal 11 ayat (1) menjelaskan bahwa yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pasal 11 ayat (2) menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pasal 13 ayat (3) menguraikan bahwa kriteria Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi adalah : Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota, Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota, Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota, Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi. Desentralisasi urusan yang juga disertai dengan pembagian perimbangan keuangan berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah, maka telah terjadi suatu perubahan dan pergeseran paradigma pengaturan dan pengelolaan tata Pemerintahan, dan sebagai konsekuensi logis dan strategis yang memerlukan penataan terhadap elemen Pemerintah daerah sebagai manifestasi otonomi daerah.

Implementasi dari otonomi daerah dimaksud, khususnya penyelenggaraan urusan pemerintahan dan organisasi perangkat daerah telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Hal ini akan menimbulkan suatu peluang dan tantangan didalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan untuk tercapainya kemandirian daerah dalam rangka mensejahterakan masyarakat sampai ke pelosok daerah.

Peluang dan tantangan perlu dikoordinasikan didalam menetapkan kebijakan-kebijakan strategis yang didasarkan pada norma, standard, kriteria, prosedur dan yang bersifat operasional dengan menyesuaikan pada kondisi dan permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan perubahan – perubahan eksternal yang terjadi tersebut, kiranya peran Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai unsur staf yang membantu Gubernur dalam perumusan kebijakan dibidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Kepemerintahan Yang Baik, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik menjadi penting dan strategis sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah melalui Gubernur, yang nantinya diharapkan akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah saat ini kinerja Biro Pemerintahan dituntut lebih dinamis, kreatif dan responsive terhadap perubahan dan tuntutan yang berkembang ditengah masyarakat.

Paradigma baru Pembangunan yang mengedepankan Tata Kepemerintahan Yang Baik (*good governance*) menuntut adanya keterbukaan dan pertanggungjawaban kinerja Instansi Pemerintah serta dalam rangka untuk menjawab tuntutan pembangunan pemerintahan seutuhnya, dan sesuai amanat Permendagri 54 Tahun 2010 pasal 89 mengenai penyusunan Rencana Strategis SKPD yang menyatakan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan Strategis merupakan sarana yang sekaligus kebutuhan nyata untuk mengatasi baik intern maupun ekstern sebagaimana persoalan yang

dihadapi dalam era globalisasi saat ini. Rencana tersebut diharapkan akan merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk dilaksanakan oleh seluruh jajaran Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2016-2021 dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dan tata kerja lembaga ini.

Didalam Rencana Strategis terkandung visi, misi, tujuan, sasaran kebijakan, program dan kegiatan dimasa mendatang. Proses perencanaan strategis ini bertitik tolak kepada orientasi hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala (kelemahan dan ancaman/tantangan) yang ada, atau mungkin akan timbul. Untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, sangat diperlukan integritas antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dalam arti luas.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program sektor Urusan Pemerintahan, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Antisipasi terhadap perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan perencanaan dan pelaksanaan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Bagi manajemen yang berorientasi pada hasil, perencanaan strategis merupakan hal yang penting. Oleh karenanya, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berupaya untuk menyusun Rencana Strategis dalam rangka pemenuhan tugas pokok dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi bidang Pemerintahan Umum, bidang Otonomi Daerah, dan bidang Hubungan Kerjasama sehingga diharapkan kinerja Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah lebih efektif, efisien dan akuntabel.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana dan Strategis (Renstra) Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 dilakukan berdasarkan pada beberapa landasan hukum utama yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Renstra SKPD khususnya serta perencanaan dan penganggaran daerah pada umumnya di era desentralisasi ini, yaitu :

- a. Undang- Undang No 17/2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang- Undang No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- c. Undang- Undang No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- d. Undang- Undang No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- e. Peraturan Pemerintah No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Presiden No 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6/2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- i. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tatacara Musrenbang;
- j. SEB Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri 0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Undang-Undang No 25/2004 mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala SKPD untuk menyiapkan Renstra SKPD, keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dengan RPJMD dan Renstra SKPD, pokok-pokok isi dokumen Renstra SKPD, status hukum Renstra SKPD. Renstra SKPD dijadikan pedoman bagi penyusunan Renja SKPD. Undang-Undang ini juga menekankan keterkaitan erat antara penyusunan RPJMD dengan RENSTRA SKPD;

- l. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34)
- n. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- o. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor ... Tahun tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021;
- p. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ini adalah sebagai dasar bagi semua stakeholder Biro Pemerintahan dan seluruh aparatur di Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan program dan kegiatan selama jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan Penyusunan Renstra Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

- a. Mengetahui kinerja Biro Pemerintahan dimasa lalu, permasalahan dan isu strategis, sasaran strategis dan bagaimana upaya pencapaiannya dalam lima tahun mendatang;
- b. Memandu perencanaan pembangunan pada Biro Pemerintahan yang berkelanjutan;
- c. Sebagai instrumen bagi pihak-pihak yang bertugas melaksanakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi program dan kegiatan;
- d. Memberikan arah dan pedoman dalam rangka melaksanakan program kerja dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam

rangka mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Periode 2016 – 2021;

- e. Sebagai alat kendali dalam rangka akuntabilitas dan penilaian kinerja Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- f. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD setiap tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan; berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; berisi Gambaran Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi; berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, Telaahan visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih, Telaahan Renstra Setjen Kemendagri, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan isu strategis yang akan dihadapi, berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan program/kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan.

BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi, dan Kebijakan; berisi visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Tengah Tahun 2016–2021.

BAB V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan pendanaan Indikatif; berisi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD; berisi mengenai Indikator Kinerja, Kondisi Awal Kinerja, dan Kondisi Akhir Kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB VII Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan penegasan terhadap komitmen untuk melaksanakan Renstra Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 secara konsisten yang implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan serta berlaku sebagai pedoman standar kinerja pelaksanaan program serta kegiatan 5 (lima) tahunan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam kaidah pelaksanaan.